

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Pemilihan judul faktor yang mempengaruhi Amerika Serikat untuk terlibat dalam pengelolaan keamanan di Selat Malaka adalah berdasarkan fenomena yang terjadi seputar masalah upaya pengelolaan keamanan di Selat Malaka. Di samping itu juga, permasalahan Selat Malaka sendiri merupakan suatu topik kajian yang masih belum banyak dibahas oleh para mahasiswa khususnya pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Permasalahan keamanan di Selat Malaka merupakan sebuah issue yang sangat menarik untuk dibahas mengingat perannya yang sangat strategis bagi jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Selain itu, letak geografisnya yang sangat strategis telah menjadikan Selat Malaka mempunyai implikasi pada banyak hal baik itu aspek politik, ekonomi maupun masalah keamanan terhadap negara-negara pantai (*coastal states*) di sekitarnya maupun bagi negara-negara pengguna (*user states*) jalur perairan tersebut. Sejak saat itu, Selat Malaka telah menjadi topik pembahasan yang sering diperbincangkan oleh dunia internasional dalam berbagai forum.

Adapun judul dari kajian ini terkait langsung dengan permasalahan yang sering muncul yakni mengenai upaya pengelolaan keamanan di Selat Malaka. Dengan melihat dari peranan Selat Malaka sebagai salah satu jalur laut yang

menuntut untuk adanya jaminan keamanan bagi pelayaran yang melintasi kawasan perairan tersebut.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kerawanan dan ancaman kemanan yang sering terjadi di Selat Malaka, maka tiga negara pantai (*coastal states*) yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura yang berbatasan langsung dengan selat tersebut telah melakukan kerjasama untuk menjaga keamanan di Selat Malaka. Upaya-upaya kerjasama dari ketiga negara pesisir tersebut dalam rangka untuk menjaga keamanan di Selat Malaka telah diwujudkan dalam pelaksanaan Patroli Bersama (*Joint Patrol*) dan Patroli Terkoordinasi (*Coordinated Patrol*).

Kemudian muncul gagasan dari banyak pihak terutama dari negara-negara pemakai jalur laut di Selat Malaka untuk mengangkat permasalahan keamanan Selat Malaka ini menjadi sebuah masalah internasional. Hal tersebut seperti yang ditunjukkan oleh sikap dari Amerika Serikat (AS) yang kemudian mengajukan diri untuk turut terlibat dalam menjaga keamanan di Selat Malaka. Gagasan AS tersebut kemudian menimbulkan berbagai pendapat pro dan kontra dari negara-negara pantai (*coastal states*) yang bertanggung jawab terhadap keamanan di Selat Malaka.

Dengan judul di atas, penulis mencoba untuk melihat serta menjelaskan apa yang menjadi kepentingan AS di Selat Malaka sehingga menyebabkan AS sangat

## **B. TUJUAN PENULISAN**

Tujuan utama dari kajian ini adalah ingin menjelaskan apa yang menjadi faktor pendorong (kepentingan) Amerika untuk turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan di Selat Malaka, meskipun telah ada perjanjian (kesepakatan) dari negara-negara pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura) yang mengatur mengenai pengelolaan keamanan di Selat Malaka tersebut.

## **C. LATAR BELAKANG MASALAH**

Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia karena membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta menghubungkan 3 dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yakni India, Indonesia, dan Cina. Dan seperti yang diketahui bahwa Selat Malaka merupakan jalur pelayaran dan perdagangan yang paling padat di kawasan Asia-Pasifik. Selat yang membentang sepanjang 800 kilometer di antara Semenanjung Melayu dan Pulau Sumatera ini sctiap hari dilalui oleh rata-rata 200 kapal berbagai jenis. Selat ini juga dilewati oleh 72 persen tanker pengangkut bahan bakar minyak yang melintas dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik.<sup>1</sup>

Dengan melihat bahwa Selat Malaka merupakan jalur yang sangat strategis bagi pelayaran dan perdagangan internasional, maka wilayah perairan tersebut sangat rawan terhadap aksi-aksi kejahatan seperti perampokan bersenjata terhadap kapal (*arm robbery against ship*), pembajakan (*piracy*), penyelundupan,

---

<sup>1</sup> <http://www.kemlu.go.id/pressroom/pressrelease/0407/01/04-1120500.htm> Akses 10 Februari 2006

pencurian, perdagangan ilegal sampai masalah pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut menuntut untuk adanya jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran bagi kapal-kapal yang melintas di wilayah perairan Selat Malaka.

Permasalahan penjagaan keamanan di Selat Malaka sebenarnya telah diatur dan disepakati bersama oleh negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan perairan tersebut, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dari hasil pertemuan tiga Menteri Luar Negeri di Singapura pada 16 November 1971, telah disepakati Pernyataan Bersama (*The Joint Statement*) mengenai beberapa dasar penanganan Selat Malaka yakni : (i). Ketiga Pemerintah sepakat bahwa keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Singapura adalah tanggung jawab dari negara pantai yang terkait; (ii). Ketiga Pemerintah menyetujui bahwa di butuhkan kerjasama dari tiga pihak (*tripartite co-operation*) demi keselamatan pelayaran di dua Selat tersebut; (iii). Ketiga Pemerintah setuju bahwa badan kerjasama untuk mengkoordinir usaha menjaga keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Singapura harus dibentuk secepat mungkin dan badan tersebut harus terdiri atas hanya ketiga negara pantai yang terkait; (iv). Ketiga Pemerintah juga menyepakati bahwa permasalahan dalam keselamatan pelayaran dan pertanyaan mengenai internasionalisasi Selat adalah dua isu yang terpisah; (v). Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia sepakat bahwa Selat Malaka dan Singapura bukanlah Selat internasional, namun secara penuh mengakui penggunaan Selat tersebut untuk pelayaran internasional sesuai dengan prinsip dari lintas damai (*the*

... ..

Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia pada point ini; (vi). Atas dasar kesepakatan ini ketiga pemerintah menyetujui kelanjutan survei hidrografis.<sup>2</sup>

Karena mengingat status Selat Malaka adalah milik tiga negara pantai (*coastal states*) yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura maka tanggung jawab keselamatan dan keamanan perairan serta pelayaran menjadi tanggung jawab ketiga negara pantai tersebut. Seperti yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982 yang mengatur bahwa keamanan laut merupakan tanggungjawab dari negara pantai yang memiliki wilayah tersebut.<sup>3</sup>

Hal tersebut berarti bahwa Selat Malaka merupakan tanggungjawab Indonesia dan Malaysia dan kemudian Singapura yang secara geografis juga terletak berdekatan dengan perairan tersebut. Dalam pertemuan *International Informal For Strategic Study* yang diikuti negara-negara kawasan Asia juga telah ada kesepakatan antar negara di Asia bahwa kerjasama keamanan tetap menjaga kedaulatan teritorial dan integritas negara masing-masing. Disamping itu, kerjasama juga mengacu pada hukum negara masing-masing dan hukum internasional.<sup>4</sup>

Jadi, selama ini operasi penjagaan keamanan di wilayah perairan Selat Malaka sudah dilakukan oleh tiga negara pantai yakni Indonesia, Malaysia dan

---

<sup>2</sup> Arif Havas Oegroseno, *The Straits of Malacca and Challenges Ahead: Indonesian Point of View*, Department of Foreign Affairs, Indonesia dalam Conference on THE STRAITS OF MALACCA Building a Comprehensive Security Environment, 11- 13 October 2004, Prince Hotel & Residence Kuala Lumpur

<sup>3</sup> <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0408/20/opi01.html>. Akses 20 Maret 2006

<sup>4</sup> <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0408/20/opi01.html>



Malaysia dan Singapura. Akan tetapi, gagasan AS tersebut awalnya hanya didukung oleh Singapura (meskipun akhirnya ikut menolak karena protes dari Indonesia dan Malaysia) dan ditolak secara tegas oleh Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia yang secara yurisdiksi memiliki kawasan perairan tersebut menolak karena Selat Malaka merupakan wilayah kedaulatan dari kedua negara tersebut.

Gagasan AS tersebut kembali disampaikan oleh Admiral William J. Fallon, Panglima Komando Wilayah Pasifik AS yang baru dalam kunjungannya ke Indonesia pada 6 Mei 2005.<sup>6</sup> Menurutnya AS tidak akan menempatkan kekuatan militernya di Selat Malaka, tetapi hanya akan memberikan bantuan baik dari segi peralatan teknis dan data-data intelijen. Meskipun demikian, rencana AS tersebut tetap saja menimbulkan banyak dugaan dan penafsiran dari berbagai pihak karena faktor kepentingan AS yang sangat besar di wilayah perairan tersebut.

Hal ini setidaknya dapat kita lihat dari beberapa preseden yang telah ada yaitu bagaimana cara AS untuk mencapai kepentingannya di wilayah atau kawasan lain seperti pendudukan AS di Jepang, Filipina, Korea Selatan dan di kawasan Timur Tengah seperti Afghanistan dan Irak. AS akan melakukan berbagai cara agar apa yang menjadi tujuan atau kepentingan nasionalnya tercapai meskipun melalui cara-cara yang sangat tidak bermartabat sebagai sebuah negara. Bukan tidak mungkin hal tersebut akan berlaku sama di Selat Malaka dengan melihat kepentingan AS yang sangat besar di wilayah tersebut.

---

#### **D. POKOK PERMASALAHAN**

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis mengambil sebuah pokok permasalahan yang sangat ingin di jawab yaitu;

***“Mengapa Amerika Serikat sangat berminat untuk terlibat dalam pengelolaan keamanan di Selat Malaka?”***

#### **E. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN**

Adapun untuk menganalisa pokok permasalahan yang telah uraikan di atas, penulis akan mencoba menyusun sebuah kerangka dasar pemikiran dengan menggunakan **Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*)** dan **Teori Geopolitik (*Geopolitical Theory*)**.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton<sup>7</sup>, kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Di dalam kepentingan nasional terdapat unsur-unsur yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara (*self preservation*), kemerdekaan (*independence*), keutuhan wilayah (*territorial integrity*), keamanan militer (*military security*), dan kesejahteraan ekonomi (*economic well-being*).

Konsep kepentingan nasional adalah konsep yang paling populer dalam analisa hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional. Konsep ini sering dipakai sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Selain

---



itu, konsep ini juga sering dipakai sebagai pengukur keberhasilan suatu politik luar negeri, yaitu untuk evaluasi.<sup>8</sup>

Menurut Hans J. Morgenthau<sup>9</sup>, konsep ini didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi, yang dianggapnya utopis bahkan berbahaya. Ia menyatakan bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan dan pengendalian ini bisa dicapai melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama.

Morghenthau membangun konsep yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional. Pemerintahlah, melalui berbagai lembaganya yang pada akhirnya paling bertanggungjawab dalam mendefinisikan dan menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional.

Morgenthau menentang tindakan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip abstrak dan universal selain prinsip kepentingan nasional. Jika keamanan masing-masing negara di dunia harus dijamin oleh semua negara di dunia, maka konflik tidak akan bisa dilokalisasi dan setiap pertikaian akan dengan cepat meningkat dan akan sangat berbahaya pada zaman nuklir saat ini. Misalnya ia dengan tegas menentang intervensi Amerika Serikat di manapun di dunia yang

---

<sup>8</sup> Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 139. Lihat juga Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe, *Pengantar Hubungan*

didasarkan pada prinsip-prinsip jaminan keamanan kolektif atau untuk mempertahankan demokrasi.

Dari konsep kepentingan nasional itulah, hal tersebut mendasari lahirnya pengambilan sebuah kebijakan politik luar negeri yang menjadi sarana untuk mencapai kepentingan nasional tersebut. Kebijakan luar negeri suatu negara tergantung kebijakan nasionalnya, sedangkan kebijakan nasional tergantung kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional masing-masing negara beragam, seperti mempertahankan keamanannya, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mengembangkan ideologi dan terakhir adalah ekspansi teritorial.

Kemudian dalam melihat permasalahan keamanan di Selat Malaka terkait dengan rencana AS untuk turut serta terlibat di dalamnya, hal tersebut dapat dilihat sebagai sebuah upaya penguasaan wilayah-wilayah strategis demi mencapai kepentingan nasional seperti yang dipaparkan dalam teori Geopolitik. Teori ini mencoba menjelaskan mengapa sejumlah negara memiliki kekuasaan sedangkan negara yang lainnya tidak dengan melihat bahwa faktor geografi dapat menentukan tindakan serta perilaku politik aktor internasional.

Di dalam teori Geopolitik ini terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli-ahli geopolitik yang sangat memperhatikan kekuatan dari faktor geografis seperti antara lain A.T. Mahan, Nicholas J. Spykman (*The Rimlands Theory*) dan Mackinder (*The Heartlands Theory*).

Admiral Alfred Thayer Mahan, seorang perwira Angkatan Laut AS pada tahun 1890 menulis buku *The Influence of Sea Power Upon History*<sup>10</sup> yang

---

<sup>10</sup> <https://www.researchgate.net/publication/321111111>

menekankan bahwa kekuatan maritim merupakan kunci untuk menjadi kekuatan dunia. Dalam pandangannya ia mengemukakan, bahwa samudera dan lautan di dunia tidak memisahkan daratan, malahan sebaliknya, menghubungkan semua wilayah yang terhalang oleh laut. Penaklukan dan pertahanan wilayah di seberang lautan bergantung pada kemampuan untuk menguasai samudera.<sup>11</sup>

Analisa Mahan tentang sejarah maritim, khususnya pertumbuhan pengaruh global negara Inggris, telah membawanya pada suatu kesimpulan bahwa kontrol atas lautan, dan terutama atas jalan-jalan strategis, adalah sangat krusial bagi status negara besar. Mahan mendasarkan teorinya pada observasi bahwa munculnya kekaisaran Inggris dan lahirnya angkatan laut Inggris terjadi secara simultan. Jalan-jalan laut yang penting di dunia telah menjadi penghubung komunikasi intern Inggris.

Jadi, negara yang mudah mencapai lautan mempunyai potensi yang lebih besar untuk mencapai status negara besar daripada negara yang terjepit daratan. Mahan menganjurkan dipeliharanya suatu angkatan laut Amerika Serikat yang besar untuk menghadapi konflik-konflik internasional sebagai akibat persaingan komersial. Mahan berpendapat bahwa kemampuan untuk mengejar tujuan-tujuan komersial, khususnya yang berkenaan dengan perdagangan internasional menunjukkan kapasitas suatu bangsa untuk menjadi negara besar.<sup>12</sup>

Di samping mempunyai nilai strategis unsur-unsur kekuatan laut seperti yang dikemukakan oleh Mahan, Selat Malaka juga mempunyai arti penting lain

---

<sup>11</sup> Jack C. Plano & Roy Olton, *op.cit.*, hal. 85

khususnya terhadap kawasan Asia Tenggara. Dalam teori daerah pinggiran atau yang terkenal dengan *The Rimlands Theory*<sup>13</sup>, Nicholas J. Spykman menyatakan bahwa daerah pinggiran (*rimland*) seperti Eropa, Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Timur Jauh sebagai daerah kunci bagi keamanan Amerika Serikat. Dalam bukunya *The Geography of Peace* (1944), Spykman mengembangkan teorinya sekitar konsep *rimland* yang selaras dan terpaut dengan “lingkaran dalam bulan sabit” (*inner crescent*) dari Mackinder dalam teori *Heartland*. (Gambar 1.1)

Menurut teori Rimland, dunia bagian Utara dilihat dari sudut pandang ekonomi, politik dan militer selalu lebih unggul daripada bagian Selatan. Dan letak sebuah negara yang berada di Utara atau Selatan ekuator akan memainkan peranan yang sangat besar yang menentukan signifikansi dari negara tersebut. Spykman melihat bahwa potensi sebenarnya dari Eurasia ialah pada wilayah *Inner Crescent* (lingkaran dalam bulan sabit) dari teori Mackinder yang disebutnya dengan daerah pinggiran (*the rimlands*). Keberadaan daerah pinggiran tersebut sangat penting mengingat daerah ini memiliki akses ke laut dan daratan. Pada masa Perang Dingin, teori *rimland* ini digunakan sebagai justifikasi para pengambil kebijakan Amerika untuk melakukan politik *containment* (pembendungan) terhadap penyebaran komunisme Uni Soviet.

Spykman menegaskan bahwa dominasi terhadap kawasan *rimland* oleh kekuatan asing yang bermusuhan akan mengancam keamanan (kelangsungan

---



Jika melihat pada gagasan Amerika yang berencana menempatkan kekuatan militernya sebagai upaya untuk turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan di Selat Malaka. Maka hal tersebut dapat dilihat sebagai sebuah kepentingan dari AS sebagai negara *superpower* untuk menguasai salah satu jalur pelayaran dan perdagangan yang terpadat di dunia, yakni Selat Malaka. Mengingat besarnya kepentingan ekonomi dan politik yang ada di Selat Malaka yang secara geografis sangat strategis tersebut, kepentingan yang dimiliki oleh AS di Selat Malaka sangatlah besar.

Hal tersebut dikarenakan jika AS dapat memegang kontrol atas jalur laut di Selat Malaka yang merupakan titik kunci (*choke points*) di seluruh kawasan Asia Tenggara, maka dari segi politik AS akan dapat dengan mudah melakukan tekanan terhadap negara-negara yang berada di sekitar kawasan tersebut, seperti Indonesia, Malaysia, Myanmar dan bahkan Cina yang dianggap sebagai ancaman bagi AS. Di samping itu juga, ketakutan AS akan bahaya atau ancaman serangan dari terorisme dapat diantisipasi dengan ikut menjaga wilayah perairan Selat Malaka yang menurut AS sangat berpotensi untuk dijadikan sarana bagi para teroris dalam melakukan serangan terhadap aset-aset AS.

Kemudian dari segi ekonomi tentunya dengan ikut serta mengamankan jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka, maka AS dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar karena lalu lintas barang dan jasa serta pasokan sumber energi seperti minyak bumi dan gas alam dari dan ke AS akan terjamin kelancarannya. Kepentingan AS tersebut sejalan seperti apa yang disampaikan

11 | Page

yaitu untuk menjaga keamanan militer (*military security*) dan kesejahteraan ekonomi (*economic well-being*) negaranya.

Tentunya kepentingan yang dimiliki oleh Amerika tersebut bisa saja sejalan ataupun bertolak belakang dengan negara-negara pantai yang berada di sekitar Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Gagasan AS tersebut menuai banyak pro dan kontra seperti Singapura yang awalnya mendukung gagasan Amerika tersebut dikarenakan oleh faktor hubungan bilateral yang sangat erat dan juga oleh faktor keamanan negaranya. Sedangkan Indonesia dan Malaysia menolak secara tegas karena menganggap bahwa tindakan tersebut sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan kedua negara.

AS kemudian melakukan penyesuaian kebijakannya dengan tidak menggelar pasukan di wilayah tersebut tetapi hanya akan membantu penjagaan keamanan dengan memberikan bantuan teknis persenjataan dan teknologi serta data-data intelijen pada negara-negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan di Selat Malaka. Alternatif kebijakan yang terakhir ini lebih dapat diterima oleh negara-negara pantai yang berada di sekitar perairan Selat Malaka terutama seperti Indonesia yang memang masih sangat terbatas kemampuan militernya dalam menjaga keamanan di Selat Malaka.

## **F. HIPOTESA**

Dari rangkaian latar belakang dan pokok persoalan yang dikemukakan di atas serta dengan aplikasi teoritik yang coba ditawarkan dalam kajian ini, telah

yang menyebabkan Amerika Serikat sangat ingin terlibat di dalam pengelolaan keamanan di Selat Malaka, yaitu :

1. ***Kepentingan Keamanan (Militer)***, yaitu untuk mendirikan pangkalan militer di Selat Malaka sebagai upaya untuk mengantisipasi serangan dan perang terhadap terorisme, terutama di kawasan Asia Tenggara.
2. ***Kepentingan Ekonomi***, yaitu untuk menjaga kelancaran suplai minyak dan arus perdagangan serta aset-aset ekonomi AS dan sekutunya di kawasan Asia Tenggara.
3. ***Kepentingan Politik***, yaitu sebagai salah satu strategi dalam membendung bangkitnya kekuatan China demi mempertahankan hegemoni AS di Asia.

#### **G. JANGKAUAN PENELITIAN**

Batasan waktu penting ditetapkan agar kajian ini bisa lebih terfokus. Dengan alasan tersebut, penulis memfokuskan kajian yakni mulai dari awal munculnya gagasan Amerika untuk terlibat dalam pengamanan di Selat Malaka pada tahun 2004 hingga perkembangannya tahun 2006 saat ini.

#### **H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Sebagaimana kajian yang sering ditemui dalam ilmu sosial, dalam mencari data-data yang diperlukan untuk menunjang penulisan skripsi ini, teknik yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan (*library-research*) yang bersumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan



dilakukan baik itu berupa buku, jurnal ilmiah, laporan riset, surat kabar maupun majalah. Selain itu pencarian data juga dilakukan dengan melakukan *searching* di berbagai website di internet.

## I. SISTEMATIKA PENULISAN

Kajian ini direncanakan akan terdiri atas lima (5) bab. Masing-masing bab menengahkan persoalan sebagai berikut :

*Bab Pertama* merupakan pendahuluan. Bab ini memuat unsur-unsur metodologis yang memang harus dipenuhi dalam sebuah karya Ilmiah. Maka pada bagian ini diuraikan alasan penulis memilih judul, latar balakang persoalan yang diangkat, pokok persoalan yang ingin dikemukakan, kerangka teoritis yang digunakan, hipotesa yang ditawarkan. Selain itu akan dikemukakan apa tujuan kajian ini, bagaimana teknik pengumpulan data yang digunakan, serta kapan jangkauan waktu yang ingin ditelaah. Bab ini merupakan gambaran umum dari keseluruhan isi kajian.

*Bab Kedua*, menggambarkan tentang Selat Malaka secara umum, yaitu dari kondisi geografisnya dan potensi yang dimilikinya. Kemudian nilai strategis yang dimiliki oleh Selat Malaka, lalu arti penting Selat Malaka bagi negara-negara pengguna (*user states*).

*Bab Ketiga*, berisi seputar permasalahan keamanan di Selat Malaka. Dilihat dari kejahatan yang sering terjadi di Selat Malaka hingga upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi persoalan-persoalan yang muncul di Selat

